



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN
TAHUN 2025

2025

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Abdi Tunggal Priyanto

Penyusun:

Enggar Pratiwi

Faridz Maulana Muhammad

Fathur Rachmadi Putra

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang
Perairan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan rida-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 berupaya memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target khususnya pada tahun 2025, memberikan penjelasan mengenai hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, serta rencana aksi pada periode berikutnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, pencapaian kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 ini, serta berharap Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 menjadi salah satu pertimbangan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan perencanaan ruang laut.



Jakarta, 23 Januari 2026
Direktur Perencanaan
Ruang Perairan,



Abdi Tunggal Priyanto
NIP. 19770401 200212 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis Direktorat PRP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PRP Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 2 Desember 2025. Pada PK tersebut, Direktorat PRP memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PRP tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat PRP Periode Tahun 2025 (IKU dan IKM) adalah 107,07% (Baik). Range nilai untuk kategori “Baik” adalah 90 – 110. Capaian IK tersebut pada Tahun 2025 sebesar 10,38% atau 122,22% dari target 8,49%. Capaian tersebut didukung oleh tercapainya dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2025 sebanyak 11 dokumen yang dibandingkan dengan 106 dokumen perencanaan sampai dengan 2029.

Capaian indikator kinerja baik IKU maupun IKM Direktorat PRP pada tahun 2025 sebagai berikut:

1) Integrasi RTRL dengan RTRWN

IKU Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan RTRWN telah tercapai 100%, dengan tersusunnya 1 Dokumen Materi Teknis RTRL yang terintegrasi ke dalam RTRWN sesuai target Tahun 2025.

2) Penyusunan RZ Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

IKU Perairan Laut Antar Wilayah yang memiliki Dokumen RZ KAW tercapai 100% dengan capaian 3 kawasan dari target 3 kawasan, meliputi RZ KAW Laut Utara Papua, Teluk Cendrawasih, dan Laut Barat Sumatera yang telah berada pada tahap harmonisasi dan proses penetapan.

3) Penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

IKU RZ KSN melampaui target dengan capaian 6 kawasan atau 150% dari target 4 kawasan, mencakup Selat Sunda, Aceh–Sumut Klaster Sabang, BBK, Maminasata, Teluk Bintuni, dan Taman Nasional Ujung Kulon yang berada pada berbagai tahapan harmonisasi, fasilitasi, dan legislasi.

4) Penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

IKU RZ KSNT tercapai 100% dengan tersusunnya Dokumen Final RZ KSNT Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur sesuai target 1 kawasan.

5) Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pengawasan

IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat PRP mencapai 100%, melampaui target sebesar 80%.

6) Nilai PM SAKIP

IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat PRP melampaui target, dengan capaian nilai 72,25 dari target 66 pada Tahun 2025.

7) Penyusunan Laporan SPIP

IKM Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat PRP tercapai sesuai target, yaitu 2 dokumen dari target 2 dokumen pada Tahun 2025.

8) Indeks Profesionalitas ASN

IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PRP melampaui target, dengan capaian indeks 83,20 dari target 80 pada Tahun 2025.

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada Tahun 2025, optimalisasi capaian target kinerja dilakukan melalui penguatan koordinasi dan pembahasan lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah guna mendukung harmonisasi substansi dokumen RTRL, RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT. Selain itu, dilakukan penyusunan dan penyempurnaan substansi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) atau pedoman teknis penataan ruang laut sebagai landasan pelaksanaan penyusunan serta integrasi dokumen perencanaan ruang perairan secara terpadu, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	9
3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	11
3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	11
3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	15
3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).....	20
3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	25
3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	31
3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	31
3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) ...	34
3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	39
3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	41

3.4 Realisasi Anggaran	46
BAB 4 PENUTUP	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Rekomendasi	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.....	4
Gambar 2. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku	9
Gambar 3. Rapat Penajaman Isu Muatan Ruang Laut di Lingkup Nasional dan Provinsi	15
Gambar 4. Rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih	19
Gambar 5. Rapat Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar	19
Gambar 6. Rapat Pembahasan Percepatan Legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang Terintegrasi RZ KSN	24
Gambar 7. Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung	24
Gambar 8. Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa Lingkungan Hidup	25
Gambar 9. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru	29
Gambar 10. Lokakarya Nasional Diseminasi dan Profiling Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru	30
Gambar 11. Rapat pembahasan penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK	34
Gambar 12. PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL pada 16–18 September 2025.....	38
Gambar 13 Rapat Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025	41
Gambar 14. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengelolaan kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

Adapun komponen pengelolaan kinerja meliputi:

1. Penjenjangan Kinerja;
2. Perencanaan Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pelaporan Kinerja; dan
5. Evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sampai dengan level di bawahnya, termasuk Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (PRP) turut serta dalam pengelolaan kinerja lingkup DJPRL.

Pasal 22 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyebutkan bahwa salah satu komponen dari pengelolaan kinerja adalah pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja terdiri atas laporan kinerja interim (setiap triwulan) dan laporan kinerja tahunan.

Direktorat PRP berupaya untuk menyusun laporan kinerja tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, akan dapat dinilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun hambatan dalam pencapaian target kinerja. Laporan kinerja Tahun 2025 ini menjelaskan secara komprehensif tentang capaian kinerja organisasi Direktorat PRP. Laporan kinerja ini memuat capaian, perbandingan, analisis keberhasilan, kendala, solusi, efisiensi, kegiatan pendukung serta rencana tindak lanjut masing - masing indikator kinerja Direktorat PRP tahun 2025. Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja berkelanjutan Direktorat PRP.

1.2 Tujuan

Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan kegiatan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat PRP pada Tahun 2025.

1.3 Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan, khususnya pengelolaan ruang laut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dihadapkan pada sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan ke depan. Identifikasi isu-isu ini disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta dokumen teknokratik Rencana Strategis Ditjen Penataan Ruang Laut Tahun 2025–2029. Isu strategis perencanaan ruang laut menjadi fokus utama dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia yang berkelanjutan. Beberapa Isu strategis perencanaan ruang laut adalah, adanya tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan ruang laut untuk ekonomi biru, dampak perubahan iklim, degradasi ekosistem pesisir dan laut, integrasi data ruang laut antar instansi, keterpaduan perencanaan ruang darat dan laut, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola ruang laut yang tertib, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peran ini sejalan dengan amanat pembangunan nasional di bidang kelautan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2017), serta berbagai ketentuan peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perencanaan ruang perairan yang masih berkaitan dengan penataan ruang laut di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut pada pasal 2 mempertegas Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang masih berada dalam kewenangan Direktorat Penataan Ruang Laut antara lain:

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:
 - a. Perencanaan Ruang Laut;
 - b. Pemanfaatan Ruang Laut;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - d. Pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
 - e. Perencanaan Ruang Perairan.
- (2) Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:
 - a. Materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
 - b. Materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
 - c. Materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. RZ KAW; dan
 - e. RZ KSNT.

1.4 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Direktorat PRP) memiliki tugas dan fungsi antara lain:

A. Tugas

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan ruang perairan.

B. Fungsi

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang laut nasional, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan penyusunan rencana ruang laut lintas batas, serta alokasi ruang kawasan konservasi perairan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

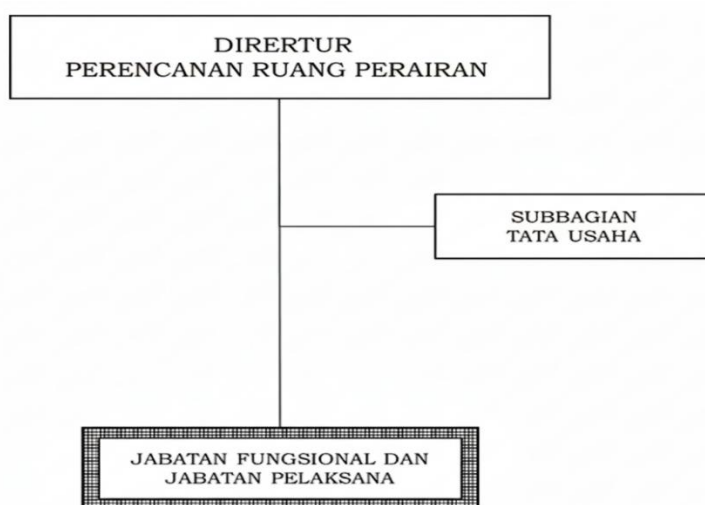
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat, Direktur Perencanaan Ruang Perairan dibantu oleh 6 (enam) tim kerja, yang terdiri dari pegawai dengan kelompok jabatan fungsional tertentu, pegawai dengan jabatan fungsional umum baik PNS, P3K maupun PJLP dan Kepala Subbag Tata Usaha. Tim kerja dalam Direktorat Perencanaan Ruang Perairan antara lain:

1. Tim Kerja RTRWN dan KAW
2. Tim Kerja KSN Ekonomi
3. Tim Kerja KSN Lingkungan
4. Tim Kerja KSNT
5. Tim Kerja Sarana dan Prasarana
6. Tim Kerja Dukungan Manajemen

Jumlah Pegawai pada setiap Direktorat Perencanaan Ruang Perairan adalah 24 Orang yang terdiri dari 20 ASN dan 5 PJLP. Adapun pembagian pegawai dalam Tim Kerja terdapat dalam Tabel 1. Sedangkan susunan Organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dapat dilihat pada Gambar 1.

NO.	UNIT PENGAWAS	JUMLAH PELAKSANA/ STAF
1	Direktur Perencanaan Ruang Perairan	1
2	Tim Kerja RTRWN dan KAW	4
3	Tim Kerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu	3
4	Tim Kerja KSN Lingkungan	3
5	Tim Kerja KSN Ekonomi	4
6	Tim Kerja Sarana dan Prasarana	3
7	Tim Kerja Dukungan Manajemen	7
JUMLAH		25

Tabel 1 Data ASN dan PJLP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (strategic issue) dalam Pengelolaan Kelautan dan laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran kegiatan Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut pada tahun 2025 - 2029, rencana kerja dan anggaran Tahun 2025, dan penetapan kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Kolom Perairan dan Dasar Laut.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Penetapan kinerja Tahun 2025 menggunakan penekanan pada yang saling berimbang dan di“*cascading*” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025. Dokumen RKT 2025 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja (PK) adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
2. Dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta memperhatikan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025. Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 2. Sebagaimana tercantum di bawah ini:

Tabel. 3 Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

Guna mendukung pencapaian kinerja tersebut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mendapatkan alokasi anggaran Rp.14.434.025.000,00 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada tanggal 2 Juni 2025. Namun demikian, adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada tidak semua Pagu anggaran dapat digunakan. Blokir anggaran sebesar Rp11.282.610.000,00 sehingga Pagu Efektif Tahun 2025 sebesar Rp.3.151.415.000,00

Pada bulan November 2025 terjadi buka blokir dan penambahan anggaran dari PNPB yang berdampak pada operasional dan keberlanjutan kegiatan. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan mendapatkan alokasi anggaran Rp.17.361.038.000,00 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2025 dengan blokir anggaran sebesar Rp9.245.040.000,00 sehingga Pagu Efektif Tahun 2025 sebesar Rp.8.115.008.000,00 sehingga berpengaruh pada perubahan capaian target kinerja. Perubahan Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel.4 berikut:

Tabel 4 Perubahan Indikator dan Target Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

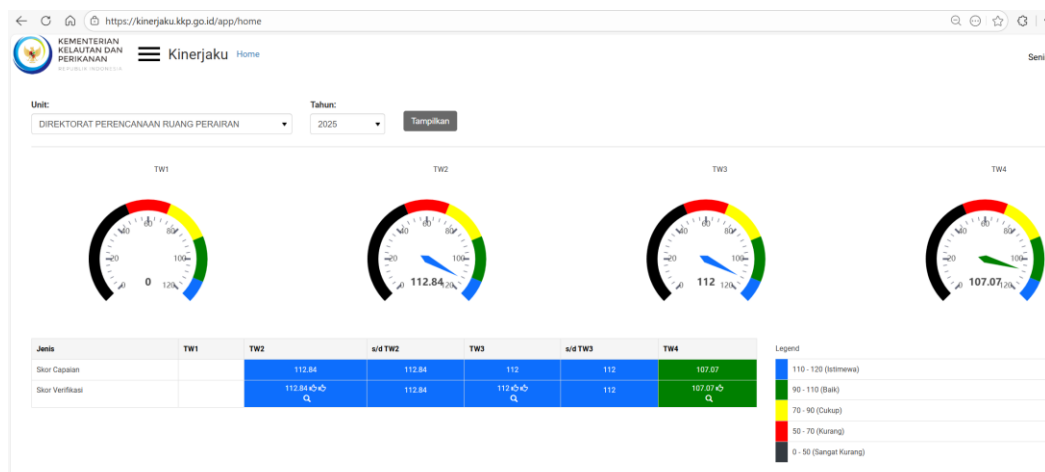
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi	3

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	1
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 8 Indikator Kinerja terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 4 Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Secara umum, Indikator Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berdasarkan aplikasi online <http://kinerjaku.kkp.go.id> sebesar 107,07 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Capaian Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 pada Aplikasi Kinerjaku

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi. Secara rinci, target dan realisasi masing-masing sasaran kegiatan dan indikator kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Target	Realisasi	% Kinerjaku
1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1	1	1	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Target	Realisasi	% Kinerja
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3	3	3	100
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4	4	6	150
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	1	1	1	100
2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80,00	80,00	100,00	120
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66	66	72,25	109,47
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat	2	2	2	100

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target Tahunan	Target	Realisasi	% Kinerja
			Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)				
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80,00	80,00	83,20	104

Sumber: [kinerjaku.kkp.go.id/Direktorat Perencanaan Ruang Perairan](http://kinerjaku.kkp.go.id/Direktorat%20Perencanaan%20Ruang%20Perairan)

Tabel di atas menginformasikan bahwa Pada Tahun 2025, kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 menunjukkan capaian yang baik dan sebagian melampaui target. Seluruh indikator pada sasaran perencanaan ruang laut dan zonasi pesisir tercapai, bahkan penyusunan Dokumen RZ KSN melebihi target. Pada sasaran dukungan manajerial, capaian rekomendasi pengawasan, nilai SAKIP, laporan SPIP, dan indeks profesionalitas ASN juga melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program serta dukungan tata kelola organisasi yang berjalan optimal.

3.2 Sasaran Kegiatan 1. Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun; 2) Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) ; 3) Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) DJPRL; 4) Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

3.2.1 IKU 1 Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 1 “Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) Nasional adalah hasil dari proses perencanaan tata ruang laut. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah rencana berisi arah kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara secara keseluruhan, yang mencakup 4 matra darat, laut, udara dan bumi. Integrasi Rencana Tata Ruang Laut

(RTRL) Nasional dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dilakukan melalui proses harmonisasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan tata ruang

Formula Perhitungan :

Menginventarisasi dan menjumlahkan Dokumen Materi Teknis Ruang Laut yang akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5 Capaian IK Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun Tahun 2025

SK – 1		Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK – 1		Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun						
Tahun 2024		Tahun 2025				Renstra 2025-2029		
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	1	1	100 (100)	-	1	100	5	20

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Tahun 2025 telah tercapai sebesar 1 Dokumen atau 100% dari target.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan target tahunan adalah 1 Dokumen dari target 1 Dokumen. Realisasi indikator Persentase pada tahun 2025 tercatat sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar 20%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Capaian indikator Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut dibandingkan dengan Target Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai penanggung jawab penyusunan RTRWN. Dalam kerangka kebijakan nasional, integrasi RTRL ke dalam RTRWN merupakan bagian dari target penyelenggaraan penataan ruang nasional yang terpadu antara ruang darat, laut, dan udara. Capaian integrasi RTRL yang disusun oleh Direktorat Jenderal

Penataan Ruang Laut telah mendukung pencapaian Target Nasional ATR/BPN, khususnya dalam pemenuhan substansi penataan ruang laut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RTRWN.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada menunjukkan kemajuan signifikan dengan terlaksananya berbagai rapat koordinasi dan pembahasan substansi kelautan dan perikanan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang RTRWN, termasuk finalisasi substansi ekonomi biru, penetapan Pulau-Pulau Kecil sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

2) Kendala

Dalam pelaksanaan integrasi RTRL dengan RTRWN masih ditemui berbagai kendala, antara lain perbedaan persepsi dan prioritas antar kementerian/lembaga dalam pembahasan substansi kelautan, keterbatasan pedoman teknis atau NSPK yang baku untuk proses integrasi spasial laut dan darat, serta belum optimalnya kualitas dan keseragaman data spasial kelautan yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen RTRWN.

3) Solusi

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan penyusunan pedoman teknis atau NSPK integrasi RTRL ke RTRWN sebagai acuan nasional yang seragam, disertai peningkatan kapasitas SDM di bidang tata ruang laut dan spasial melalui pelatihan serta bimbingan teknis.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang cukup baik, terutama melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga yang mampu meminimalkan duplikasi kegiatan dan mengoptimalkan pemanfaatan waktu, anggaran, serta sumber daya manusia. Namun demikian, efisiensi tersebut belum sepenuhnya optimal akibat perbedaan persepsi antar pemangku kepentingan, keterbatasan pedoman teknis integrasi, kualitas data spasial kelautan yang belum seragam, serta keterbatasan kapasitas SDM, yang menyebabkan proses harmonisasi memerlukan waktu dan upaya tambahan.

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain:

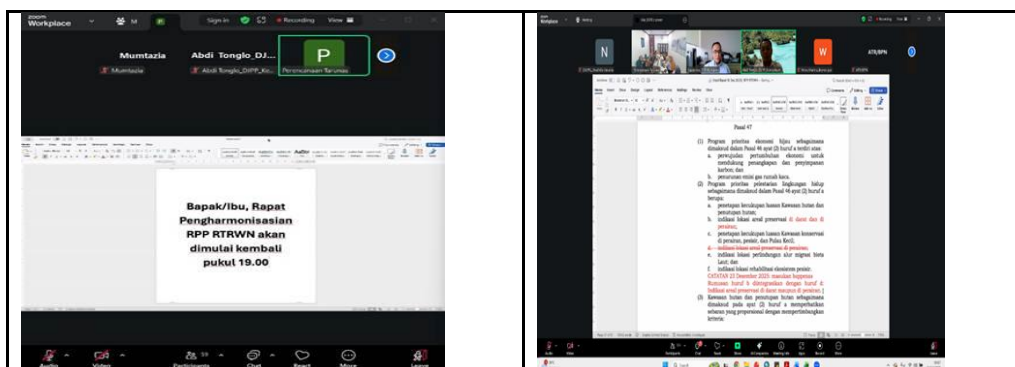
1. Rapat Pembahasan Muatan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pada tanggal 7 Agustus 2025 bertempat di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat
 - Rapat dibuka oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut dan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Perairan dengan dihadiri para pejabat Eselon I dan perwakilan unit terkait di lingkup KKP. Rapat bertujuan memastikan substansi ekonomi biru, khususnya program prioritas masing-masing Unit

Eselon I, telah terakomodasi dalam RPP RTRWN sebelum pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK). Hasil rapat menyepakati integrasi substansi ekonomi biru yang meliputi perluasan kawasan konservasi, areal preservasi, alur migrasi biota laut, kawasan budidaya laut, pergaraman nasional, gugus pulau-pulau kecil, dan hilirisasi produk kelautan dan perikanan, serta merekomendasikan penambahan substansi rehabilitasi ekosistem pesisir dan alternatif penerapan kawasan konservasi secara mixed use pada kawasan budidaya dengan pengaturan pemanfaatan ruang yang sesuai.



2. Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada tanggal 23 Desember 2025

- Rapat dipimpin oleh Bapak Abdi Tonglo dari Kementerian Hukum dan dihadiri perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga terkait untuk menjaring masukan, saran, dan tanggapan terhadap RPP RTRWN. Hasil rapat menyepakati penyempurnaan substansi Indikasi Program Prioritas Nasional, antara lain penyesuaian ketentuan ekonomi hijau dan pelestarian lingkungan hidup, persetujuan muatan ekonomi biru yang meliputi pengembangan kawasan perikanan budidaya, pergaraman nasional, revitalisasi tambak rakyat, gerbang maritim nusantara, dan pengelolaan karbon biru, penyederhanaan substansi penyediaan perumahan, serta penambahan muatan IAZSN terkait koridor pipa bawah laut nasional, koridor kabel bawah laut nasional, dan kawasan konservasi biota laut serta ekosistem pesisir.



3. Rapat Penajaman Isu Muatan Ruang Laut di Lingkup Nasional dan Provinsi pada hari Selasa, 16 September 2025 bertempat di Hotel Sutasoma Jakarta



Gambar 3. Rapat Penajaman Isu Muatan Ruang Laut di Lingkup Nasional dan Provinsi

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Tahun 2026 untuk indikator kinerja Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah Tindak Lanjut Implementasi Peraturan Presiden tentang RTRWN

3.2.2 IKU 2 Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 2 “Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW) (Wilayah)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Rencana zonasi Kawasan antar wilayah RZ KAW adalah kawasan laut sejauh 12 mil dari garis pantai ke arah laut, yang diukur dari garis pantai wilayah laut suatu daerah provinsi, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk mengelola sumberdaya dan penataan ruangnya, rencana zonasi KAW yang di maksud meliputi Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan, Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi, Peninjauan Kembali Rencana Zonasi.

Rencana zonasi KAW yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan dan/atau Revisi Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final dan/atau review dan pembaharuan terhadap dokumen RZ yang sudah disusun tapi lebih dari 5 tahun yang belum di tetapkan.
- b. Tindak lanjut Rencana Tata Ruang / Rencana Zonasi meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
- c. Peninjauan Kembali Rencana Zonasi meliputi:

- 1) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa:
 - Bencana Alam skala besar yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang di tetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
- 2) Peninjauan Kembali terhadap dokumen rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun hasil dari perwujudan penilai penataan ruang dan/atau Zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang. (KAW)

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen Final Rencana Zonasi KAW, Dokumen Tindak Lanjut RZ KAW, dan Peninjauan Kembali terhadap RZ KAW.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian IK Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah Tahun 2025

SK – 1		Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir						
IK – 2		Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah						
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	3	3	100 (100)	-	1	100	21	14,29

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator Perairan Laut Antar Wilayah yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) pada tahun 2025 telah tercapai sebesar 3 kawasan atau 100% dari target 3 kawasan, dengan output: a.) Dokumen tindak lanjut / Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW Laut Utara Papua (Harmonisasi); b.) Dokumen tindak lanjut / Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW Teluk Cendrawasih (Harmonisasi); dan c.) Dokumen tindak lanjut / Rancangan Peraturan Presiden tentang RZ KAW Laut Barat Sumatera (Proses Penetapan di Setneg).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit

organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029
Capaian indikator kinerja Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah dengan target tahunan adalah 3 Kawasan dari target 3 Kawasan. Realisasi indikator Persentase pada tahun 2025 tercatat sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar 14,29%.
- D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)
Capaian indikator kinerja Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 3 kawasan dari target tahunan 3 kawasan, atau tercapai sebesar 100%. Pencapaian ini mencerminkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra DJPRL Tahun 2025–2029.
- E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- 1) Analisis

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) pada menunjukkan kemajuan yang positif dengan tercapainya sejumlah kegiatan strategis. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berhasil melaksanakan harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) RZ KAW untuk Teluk Cenderawasih dan Laut Utara Papua, yang menjadi langkah penting dalam penyelarasan kebijakan antarwilayah di kawasan timur Indonesia. Selain itu, kegiatan penilaian perwujudan ruang RZ KAW Selat Makassar juga telah dilaksanakan untuk mengukur keterwujudan struktur dan pola ruang laut serta menyiapkan rekomendasi revisi dokumen tahun 2025.

- 2) Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan masih dijumpai beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian indikator kinerja, antara lain keterbatasan data spasial terkini dan valid untuk mendukung proses harmonisasi substansi RZ KAW, khususnya pada kawasan Teluk Cenderawasih dan Laut Utara Papua yang memiliki karakteristik geografis kompleks. Selain itu, belum optimalnya koordinasi antarprovinsi serta perbedaan persepsi terhadap delineasi batas dan pemanfaatan ruang laut turut memperlambat proses penyelarasan substansi.

- 3) Solusi

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain memperkuat koordinasi lintas wilayah dan lintas kementerian/lembaga, khususnya antara KKP, ATR/BPN, BIG, serta pemerintah provinsi yang terlibat dalam kawasan antarwilayah. Diperlukan pembaruan dan validasi data spasial laut secara berkala untuk memastikan ketersediaan informasi terkini sebagai dasar penilaian dan harmonisasi substansi RZ KAW.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta kegiatan penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan optimalisasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pihak non-pemerintah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

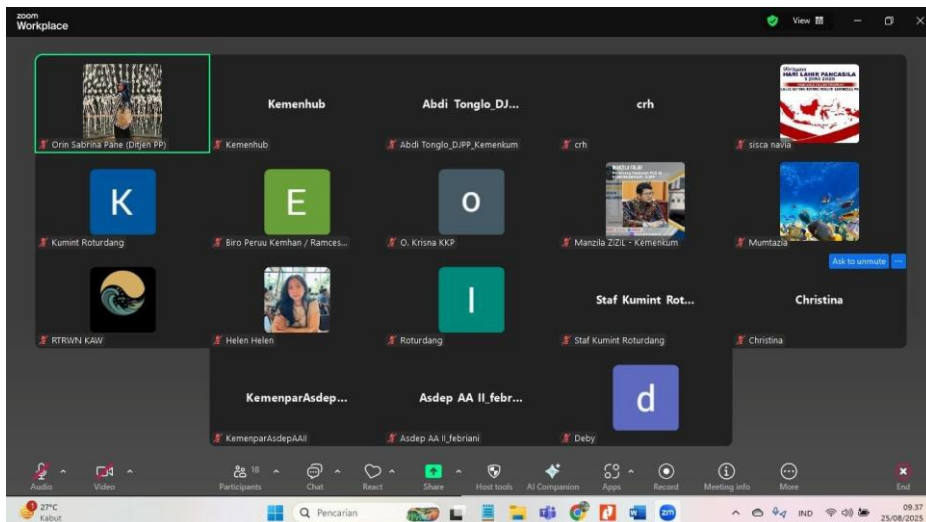
Pada Tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh instansi pemerintah yang bersumber dari APBN, termasuk Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Salah satu indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat terkait adalah Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dengan target tahunan sebanyak 3 kawasan. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 3 kawasan dari target 3 kawasan, atau tercapai 100%.

Capaian indikator tersebut tetap dapat direalisasikan secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung oleh sinergi dan kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dukungan teknis dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen rencana zonasi kawasan antar wilayah. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi anggaran Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, namun ditopang oleh kerja sama multipihak yang efektif.

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain :

1. Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua, 25 Agustus 2025
 - Rapat yang dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III dan dihadiri oleh perwakilan dari KKP serta kementerian/lembaga terkait ini membahas penyempurnaan muatan indikasi program dalam Rancangan Perpres RZ Kawasan Antarwilayah Laut Utara Papua. Pembahasan meliputi penetapan koridor pipa dan kabel bawah laut, strategi pengembangan perikanan tangkap di Zona U8, serta penambahan program mitigasi dan adaptasi bencana melalui penguatan sistem peringatan dini. Selain itu, dibahas pula lima program utama pendayagunaan sumber daya dan jasa lingkungan PPKT, seperti pengembangan agrominawisata terpadu, pemberdayaan masyarakat, peningkatan industri maritim, pembangunan infrastruktur konektivitas, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya bernilai tambah. Tindak lanjutnya, Tim Teknis KKP akan menyempurnakan masukan serta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pemutakhiran data.



Gambar 4. Rapat PAK (Perpres RZ KAW) Laut Utara Papua dan Cendrawasih

2. Rapat Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar pada 22 September 2025 di RR. Cakalang, Lt. 1 Gd. Mina Bahari III
 - Rapat yang dihadiri oleh perwakilan berbagai direktorat di KKP, Kementerian Pertahanan, Ditjen Infrastruktur Digital, serta DKP provinsi secara luring dan daring ini bertujuan menilai keterwujudan ruang RZ Kawasan Antarwilayah (KAW) Selat Makassar berdasarkan Perpres No. 83 Tahun 2020. Penilaian dilakukan melalui pendekatan desk study, wawancara, observasi, serta analisis spasial dan non-spasial untuk mengukur realisasi struktur dan pola ruang laut yang mencakup lima provinsi dan 23 kabupaten/kota dengan luas ± 19 juta hektar. Hasil sementara menunjukkan beberapa zona pemanfaatan utama telah terwujud, namun masih terdapat ketidaksesuaian antara program utama dan muatan RZ KAW serta pemanfaatan ruang yang belum optimal. Ditemukan pula keterbatasan data KKPRL dan perlunya harmonisasi perencanaan pusat–daerah serta pemutakhiran data spasial dan non-spasial.



Gambar 5. Rapat Penilaian Perwujudan Ruang RZ KAW Selat Makassar

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi pada Tahun 2026 untuk indikator kinerja Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) adalah Peninjauan Kembali Selat Makassar

3.2.3 IKU 3 Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, teknologi tinggi, sumberdaya alam dan/atau lingkungan.

Rencana zonasi KSN yang dimaksud mencakup:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dokumen final RZ KSN. Penyusunan dokumen dapat berupa:
 - (1) Penyusunan Dokumen RZ KSN;
 - (2) Revisi Dokumen RZ KSN yang sudah pernah ditetapkan dan ditinjau kembali; atau
 - (3) Penyusunan Pembaharuan Dokumen RZ yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan lebih dari 5 tahun/sudah *direview*.
- b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSN berupa penindaklanjutan Dokumen Final RZ KSN dalam rangka penajaman muatan, sosialisasi, integrasi dan/atau menindaklanjuti proses fasileg Perpres RTR KSN;
- c. Penyusunan Materi Peninjauan Kembali/*review* dapat berupa pengkajian kesesuaian RZ KSN dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang dan/atau perwujudan RZ KSN. Penyusunan materi peninjauan kembali/*review* dapat berupa:
 - (1) kajian yang disampaikan kepada Menteri ATR sebagai bahan usulan/pertimbangan peninjauan kembali Peraturan Presiden RTR KSN yang dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan atau kurang dari 5 tahun apabila perubahan lingkungan strategis.
 - (2) *review* terhadap dokumen RZ KSN yang sudah disusun lebih dari 5 tahun yang belum diintegrasikan dan/atau ditetapkan kedalam Perpres RTR KSN

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun Dokumen Final RZ KSN (baik yang disusun baru, direvisi, atau diperbaharui), Dokumen Tindak Lanjut RZ KSN dan Materi Peninjauan Kembali atau Review RZ KSN

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) Tahun 2025

SK – 1	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir							
IK – 3	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	4	6	150 (150)	-	4	150	61	9,84

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) yang disusun telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 6 kawasan atau 150% dari target 4 kawasan dengan output: a.) Dokumen final pembaharuan RZ KSN Selat Sunda (Harmonisasi); b.) Dokumen final pembaharuan RZ KPN Aceh Sumut Klaster Sabang (persiapan interaksi 2026); c.) Dokumen tindak lanjut RZ KSN BBK (persiapan proses permintaan paraf MKP); d.) Dokumen tindak lanjut RZ KSN Maminasata (Harmonisasi); e.) Dokumen tindak lanjut RZ KSN Teluk Bintuni (fasilitasi dan legislasi di Setneg); dan f.) Dokumen tindak lanjut RZ KSN Taman Nasional Ujung Kulon (fasilitasi dan legislasi di setneg).

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) dengan target tahunan adalah 6 Kawasan dari target 4 Kawasan. Realisasi indikator Persentase pada tahun 2025 tercatat sebesar 150%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar 9,84%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebanyak 6 kawasan dari target tahunan 4 kawasan, sehingga tingkat capaian indikator tercatat sebesar 150%. Pencapaian ini mencerminkan kinerja yang melampaui target tahunan yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2025–2029, capaian Tahun 2025 tersebut telah berkontribusi sebesar 9,84% terhadap target kumulatif Renstra.

Jika dibandingkan dengan Target Nasional penataan ruang yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), capaian penyusunan dokumen RZ KSN oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut memiliki keterkaitan langsung dalam mendukung pemenuhan substansi penataan ruang laut pada Kawasan Strategis Nasional. Dokumen RZ KSN yang disusun menjadi bagian integral dari sistem penataan ruang nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyusunan dan penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Dengan demikian, capaian kinerja ini tidak hanya melampaui target internal DJPRL, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Target Nasional ATR/BPN dalam mewujudkan keterpaduan penataan ruang darat dan laut pada Kawasan Strategis Nasional.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan fasilitasi penyusunan dan integrasi Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) pada menunjukkan capaian kinerja yang baik dengan berbagai kemajuan signifikan dalam proses legislasi dan penyempurnaan substansi. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan berhasil memfasilitasi pembahasan dan klarifikasi muatan kelautan dan perikanan dalam RPerpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda, termasuk penyelarasan dengan aspek pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, serta rencana tata ruang wilayah darat di kawasan tersebut. Selain itu, telah dilaksanakan pembahasan percepatan legalisasi RPerpres RTR KSN terintegrasi RZ KSN bersama Kemensetneg, Kemenkumham, dan ATR/BPN.

2) Kendala

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitas pencapaian indikator kinerja, terutama terkait kompleksitas koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam proses harmonisasi substansi. Perbedaan persepsi terhadap delineasi ruang laut dan batas wilayah KSN, serta keterbatasan pedoman teknis integrasi RZ KSN ke RTR KSN, kerap menimbulkan perdebatan dan perlunya penyesuaian berulang. Dari aspek kelembagaan, keterbatasan SDM dengan kompetensi teknis tata ruang laut yang memadai juga menjadi tantangan dalam mendukung proses penyusunan dan klarifikasi substansi RZ KSN.

3) Solusi

Perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor secara intensif antara KKP, ATR/BPN, Kemenhan, Kemensetneg, dan pemerintah daerah guna menyatukan persepsi dan mempercepat proses legalisasi RPerpres RTR KSN terintegrasi RZ KSN. Penyusunan pedoman atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengatur integrasi RZ KSN ke RTR KSN perlu segera diformalkan sebagai acuan nasional yang seragam. Di sisi lain, peningkatan kapasitas SDM di bidang tata ruang laut melalui pelatihan teknis dan bimbingan substantif harus diprioritaskan agar proses fasilitasi lebih efektif dan berkualitas. Untuk mengatasi permasalahan pengumpulan database RTR KSN Mamminasata, tindak lanjut yang dilakukan adalah

berkoordinasi dengan PIC RTR KSN Mamminasata sebelumnya guna mempercepat pembaharuan dan validasi data,

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta kegiatan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN). Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan optimalisasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pada Tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh instansi pemerintah yang bersumber dari APBN, termasuk pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, khususnya Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Salah satu indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Perencanaan Ruang Perairan adalah Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), dengan target tahunan sebanyak 4 kawasan. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebanyak 6 kawasan, sehingga tingkat capaian indikator tercatat sebesar 150%.

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung pelaksanaan IK ini adalah antara lain:

1. Rapat Pembahasan Percepatan Legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang Terintegrasi RZ KSN pada tanggal 8 September 2025 secara luring di RR. Segoro Waseso, GMB II Lantai 15.
 - Rapat yang dipimpin oleh Direktur Perencanaan Ruang Perairan DJPRL dan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga ini bertujuan membahas percepatan legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN terintegrasi RZ KSN serta merumuskan tindak lanjut penetapan KSN ke depan. Dalam rapat disampaikan bahwa dari 38+1 RTR KSN, sebagian telah selesai harmonisasi dan sebagian lainnya masih dalam proses, termasuk kawasan Batam-Bintan-Karimun, Sabang, TN Komodo, dan Pancangsarak yang tengah berada di Setneg untuk pencermatan dan paraf, sementara kawasan lain seperti Mamminasata, Bimindo, Sarbagita, Mebidangro, serta kawasan perbatasan laut dan NTT menunggu penyampaian ke Presiden. Berbagai kementerian memberikan masukan terkait percepatan proses, penyederhanaan lampiran peta melalui barcode, penyesuaian nomenklatur, serta penyusunan KLHS untuk TN Komodo. Sebagai tindak lanjut, Setneg dan ATR



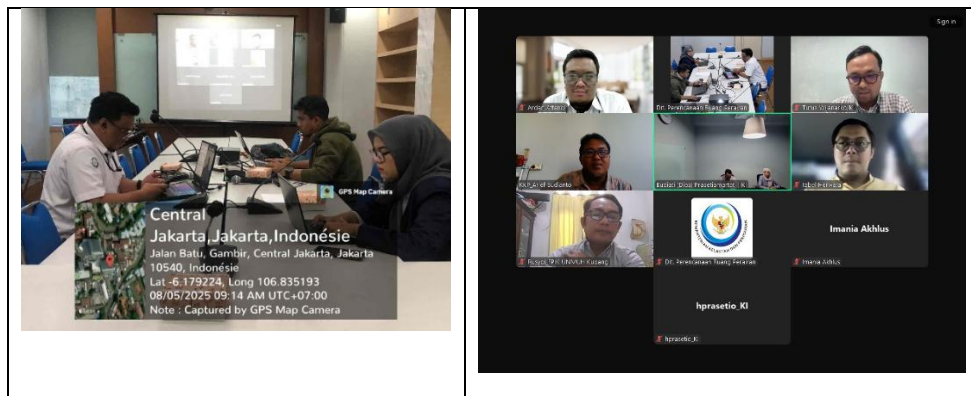
Gambar 6. Rapat Pembahasan Percepatan Legalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR KSN yang Terintegrasi RZ KSN

2. Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung pada tanggal 11 September 2025 di Kota Bandar Lampung
 - Rapat yang dibuka oleh Kasubdit Perencanaan Tata Ruang KSN II dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian ATR/BPN, KKP, serta berbagai perangkat daerah Provinsi Lampung dan kabupaten/kota terkait ini bertujuan untuk melakukan ekspos RTR KSN Kawasan Selat Sunda dalam rangka fasilitasi legislasi Rancangan Perpres yang sedang dalam proses harmonisasi. Hasil rapat mencakup usulan agar Tanggamus dimasukkan ke RTR KSN Selat Sunda sebagai Sentra Kegiatan Perikanan Tangkap selain Teluk Betung, penegasan bahwa Rencana KI Tanggamus dengan core industri maritim (docking kapal) telah tercantum dalam RIPIP Lampung, perlunya penyesuaian nomenklatur pelabuhan antara RTRW Kabupaten dan RTR KSN, serta pentingnya penyelarasan dengan Revisi RZWP3K terbaru yang sudah terintegrasi dengan RTRWP terkait pelabuhan perikanan, sentra perikanan, dan jaringan pipa serta kabel bawah laut.



Gambar 7. Fasilitasi Legislasi RPerpres RTR KSN Selat Sunda dengan Pemda Lampung

3. Pembahasan Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Agustus 2025 di Ruang Rapat Baronang, GMB 3 Lt.1, dan secara daring
- Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Universitas Muhammadiyah Kupang dan Yayasan Konservasi Indonesia ini membahas usulan penetapan Perairan Pulau Sumbawa dan sekitarnya sebagai KSN Lingkungan dalam RPP RTRWN 2025–2045. Hasil pembahasan menekankan pentingnya kajian ilmiah untuk mendukung deliniasi wilayah karena kawasan ini memiliki nilai strategis sebagai jalur migrasi spesies laut dan habitat hiu paus di Teluk Saleh, namun juga menghadapi ancaman seperti alih fungsi lahan, overfishing, dan tekanan pariwisata. Sebagai tindak lanjut, KKP bersama NGO dan akademisi akan menyusun roadmap, kajian awal, serta pertemuan lanjutan guna memperkuat dasar penetapan KSN Lingkungan Sumbawa.



Gambar 8. Wilayah Perencanaan KSN Lingkungan Hidup Baru di Perairan Sumbawa Lingkungan Hidup

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi pada Tahun 2026 untuk indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) di antaranya:

- 1) Pembaharuan RZ KSN Jabodetabekpunjur
- 2) Penyusunan Dokumen RZ KSN Pertahanan dan Keamanan PPKT P. Bongkil

3.2.4 IKU 4 Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nomor 3 “Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)” ini merupakan indikator yang mendukung eselon 1 dengan target capaian dihitung tahunan. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

1. Rencana zonasi KSNT yang dimaksud mencakup:
 - a. Penyusunan dan/atau Revisi Rencana Zonasi KSNT: penyusunan RZ yang mencakup dokumen awal, dokumen antara dan/atau dokumen final.
 - b. Tindak lanjut Rencana Zonasi KSNT meliputi: pelaksanaan penajaman muatan, pemantapan teknis, koordinasi lintas sektor, pembahasan antar K/L, harmonisasi, sosialisasi, desiminasi dan/atau proses fasilitasi legalisasi peraturan perundangan yang berlaku dan/atau;
 - c. Peninjauan Kembali terhadap Rencana Zonasi KSNT hasil penilaian perwujudan rencana zonasi agar tetap relevan dengan perkembangan kebijakan, kondisi lingkungan, dan dinamika pemanfaatan ruang yang meliputi:
 - 1) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang mengalami perubahan lingkungan strategis berupa:
 - Bencana Alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
 - Perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan/atau;
 - Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis
 - 2) Peninjauan Kembali terhadap rencana zonasi yang telah ditetapkan selama 5 tahun

Formula Perhitungan

Menginventarisasi dan menjumlahkan Kawasan yang telah disusun atau direvisi Dokumen RZ KSNT, Dokumen Tindak Lanjut RZ KSNT dan/atau Peninjauan Kembali terhadap RZ KSNT.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Tahun 2025

SK – 1 IK – 4	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)							
	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Tahun 2024	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	1	1	100 (100)	-	1	100	22	4,55

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian Indikator Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) Cadangan Karbon Biru yang disusun telah tercapai sesuai target yaitu sebesar 1 Kawasan atau 100% dari target 1 Kawasan dengan output Dokumen final RZ KSNT Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Capaian Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) dengan target tahunan adalah 1 Kawasan dari target 1 Kawasan. Realisasi indikator Persentase pada tahun 2025 tercatat sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL sebesar 4,55%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Capaian indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 1 kawasan dari target tahunan 1 kawasan, atau tercapai sebesar 100%. Pencapaian ini menunjukkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target tahunan yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2025–2029, capaian Tahun 2025 tersebut telah berkontribusi sebesar 4,55% terhadap target kumulatif Renstra.

Jika dibandingkan dengan Target Nasional penataan ruang yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), capaian penyusunan dokumen RZ KSNT oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut berperan sebagai dukungan substantif terhadap pemenuhan aspek penataan ruang laut pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Dokumen RZ KSNT yang disusun menjadi bagian integral dari sistem penataan ruang nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam penyusunan dan penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) serta rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Dengan demikian, capaian kinerja ini tidak hanya mendukung pencapaian target jangka menengah DJPRL, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Target Nasional ATR/BPN dalam mewujudkan keterpaduan penataan ruang darat dan laut pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) pada menunjukkan capaian kinerja yang positif. Hal ini terlihat dari serangkaian kegiatan strategis yang berhasil dilaksanakan secara tepat waktu dan terkoordinasi, seperti rapat pembahasan pedoman umum RZ KSNT, pembahasan profiling lokasi, persiapan diseminasi, hingga lokakarya karbon biru yang melibatkan berbagai

pemangku kepentingan. Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (PRP) bersama mitra seperti YKAN telah menunjukkan sinergi yang baik dalam menyusun pedoman penyusunan dan prioritas lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru (CKB). Selain itu, capaian penting berupa diseminasi perkembangan perancangan RZ KSNT dengan penetapan 17 lokasi indikatif Cadangan Karbon Biru sebagai bagian dari RTRWN 2025–2045 menjadi bukti konkret kemajuan dalam proses perencanaan ruang laut strategis nasional.

2) Kendala

Pelaksanaan kegiatan RZ KSNT di masih menghadapi sejumlah kendala. Dari aspek teknis, proses pengumpulan dan verifikasi data lapangan di 17 lokasi indikatif belum sepenuhnya merata karena keterbatasan waktu, sumber daya, serta variasi kualitas data spasial antarwilayah. Selain itu, belum tersusunnya pedoman operasional yang baku untuk penghitungan dan penetapan kawasan Cadangan Karbon Biru menyebabkan interpretasi teknis berbeda antarinstansi. Dari sisi koordinasi, keterlibatan lintas kementerian/lembaga dalam mendukung kebijakan karbon biru masih perlu diperkuat, terutama dalam hal penyelarasan data dan kebijakan sektoral. Tantangan lainnya adalah keterbatasan kapasitas SDM di tingkat daerah dalam memahami konsep RZ KSNT dan keterkaitannya dengan rencana tata ruang nasional, yang berdampak pada lambatnya sinkronisasi kebijakan antarwilayah.

3) Solusi

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan perlu menerapkan langkah-langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai pengembangan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Kedua, peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis harus terus diperluas baik di tingkat pusat maupun daerah, agar kemampuan dalam penyusunan, analisis spasial, dan integrasi kebijakan semakin merata. Ketiga, perlu dilakukan penguatan koordinasi antarinstansi melalui forum bersama yang fokus pada harmonisasi data spasial dan kebijakan karbon biru nasional, serta percepatan penyelarasan dengan RTRWN.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholder) dalam pelaksanaan rapat koordinasi, pembahasan teknis, serta kegiatan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT). Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan optimalisasi peran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta mitra non-pemerintah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja.

Pada Tahun 2025, kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh instansi pemerintah yang bersumber dari APBN, termasuk pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, khususnya

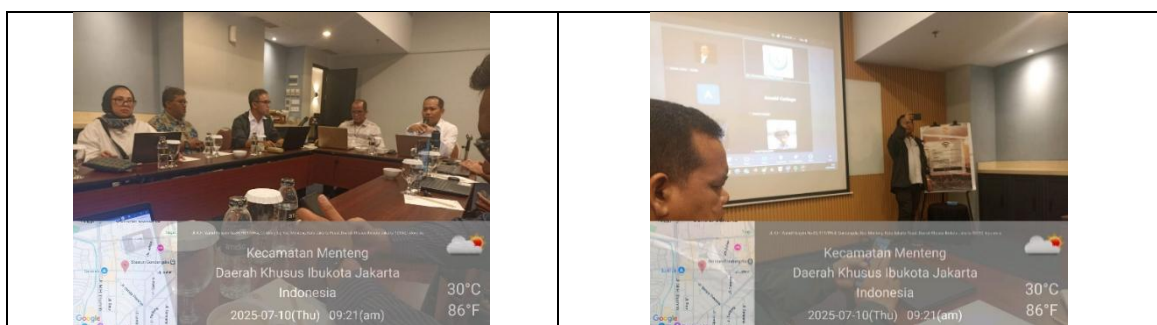
Direktorat PRP. Salah satu indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat PRP adalah Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dengan target tahunan sebanyak 1 kawasan. Realisasi kinerja pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 1 kawasan dari target 1 kawasan, atau tercapai sebesar 100%.

Capaian indikator tersebut tetap dapat direalisasikan secara optimal meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung oleh adanya sinergi pembiayaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta dukungan teknis dan pendanaan dari beberapa mitra non-pemerintah (NGO) dalam proses penyusunan dokumen RZ KSNT. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) DJPRL Tahun 2025–2029, capaian Tahun 2025 ini telah berkontribusi sebesar 4,55% terhadap target kumulatif Renstra, sehingga menunjukkan progres awal yang positif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis jangka menengah DJPRL.

G. Kegiatan Pendukung

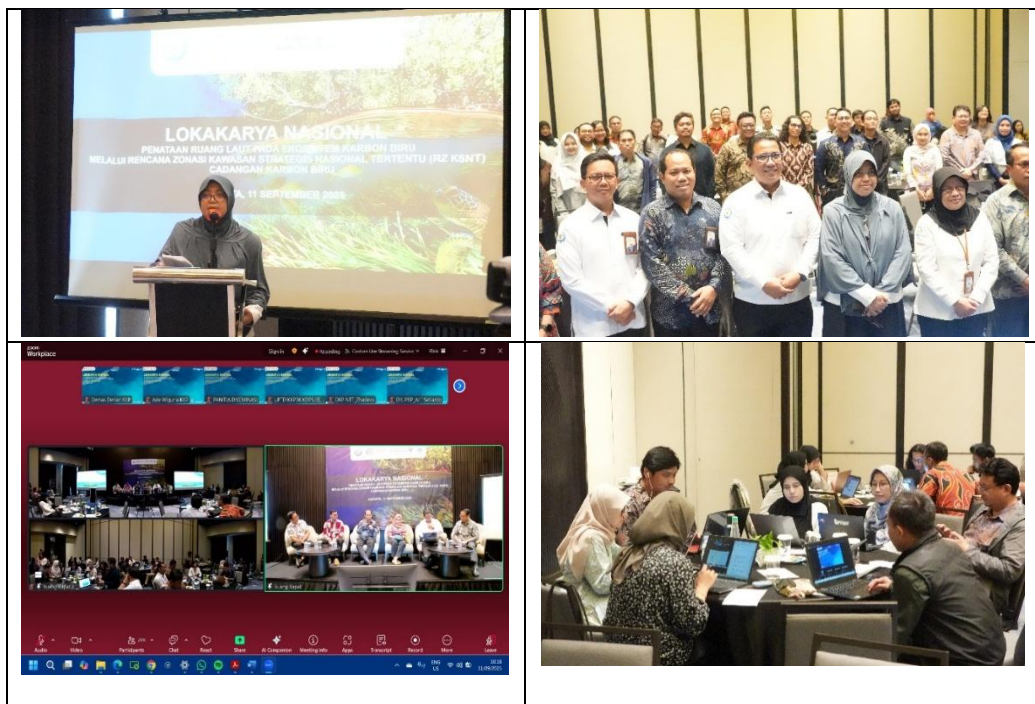
Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

1. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru pada tanggal 10 Juli 2025 di hotel Oria
 - Kegiatan yang dihadiri perwakilan berbagai direktorat di Ditjen PRL ini bertujuan menindaklanjuti amanat PP No. 21/2021 dan Permen KP No. 28/2021 terkait penyusunan RZ KSNT untuk perlindungan lingkungan dan alokasi karbon biru dalam RTRWN melalui reviu data aktual lamun dan mangrove. Dibahas pentingnya sinkronisasi data antarinstansi, pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem lamun, serta penyusunan pedoman teknis dan normatif RZ KSNT. Hasil kegiatan menekankan manfaat RZ KSNT dalam mendukung daya dukung ekosistem karbon biru, pencapaian target iklim nasional, peningkatan nilai ekonomi karbon biru, serta harmonisasi pemanfaatan ruang laut, dengan usulan kontribusi perlindungan lamun minimal 30% dari total nasional.



Gambar 9. Rapat Pedoman Penyusunan dan Prioritasi Lokasi RZ KSNT Cadangan Karbon Biru

2. Lokakarya Nasional Diseminasi dan Profiling Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru pada tanggal 11 September 2025 di Jakarta
- Lokakarya yang dihadiri sekitar 110 peserta luring dan 269 peserta daring ini melibatkan berbagai pihak dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti, praktisi, swasta, dan mitra nasional, dengan tujuan menginformasikan potensi ekologi dan ekonomi karbon biru padang lamun, menyebarluaskan perkembangan perancangan RZ KSNT Cadangan Karbon Biru, serta mengumpulkan data dari 17 lokasi indikatif KSNT. Kegiatan menghasilkan berbagai pemaparan penting, antara lain kebijakan karbon biru dalam Renstra KKP 2025–2029, pentingnya standar data dan pemetaan ekosistem lamun, peran KSNT dalam pengelolaan cadangan karbon biru sesuai PP 32/2019, penyusunan Rencana Aksi Nasional karbon biru oleh NBCAP, serta peran strategis pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan berkelanjutan. Selain itu, dibahas pula tantangan implementasi perdagangan karbon oleh PLN Nusantara Power. Pada sesi kedua, dilakukan pengumpulan dan diskusi data terkait biofisik, hidrologi, karbon, sosial ekonomi, tata ruang, serta skenario proyek karbon di 17 lokasi, meski masih diperlukan tindak lanjut pengumpulan data dukung oleh tim direktorat.



Gambar 10. Lokakarya Nasional Diseminasi dan Profiling Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Cadangan Karbon Biru

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi Tahun 2026 untuk indikator kinerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional

Tertentu (RZ KSNT) adalah Penyusunan Dokumen Final RZ KSN Karbon Biru Perairan Tual dan sekitarnya.

3.3 Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

Dalam upaya mencapai Sasaran Kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, capaian kinerja diukur berdasarkan Indikator Kinerja: 1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan; 2) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) ; 3) Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan; 4) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

3.3.1 IKM 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 4 “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%) merupakan ukuran sejauh mana Direktorat menindak lanjuti dan mengimplementasikan rekomendasi dari hasil pengawasan, baik internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti secara tuntas oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode Triwulanan, dinyatakan dalam bentuk persentase.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)” sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah diberikan kepada unit kerja}} \times 100\%$$

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 9 Capaian IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%) Tahun 2025

SK – 2 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan								
IK – 5 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan								
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	100	120 (120)	-	80	120	84	114,29

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini adalah 100% dari target 80% sehingga persentase capaiannya adalah 120%. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Tahun 2025 telah disampaikan melalui surat Nomor B.62/DJPRL.1/TU.140/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PRL” Triwulan IV Tahun 2025.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

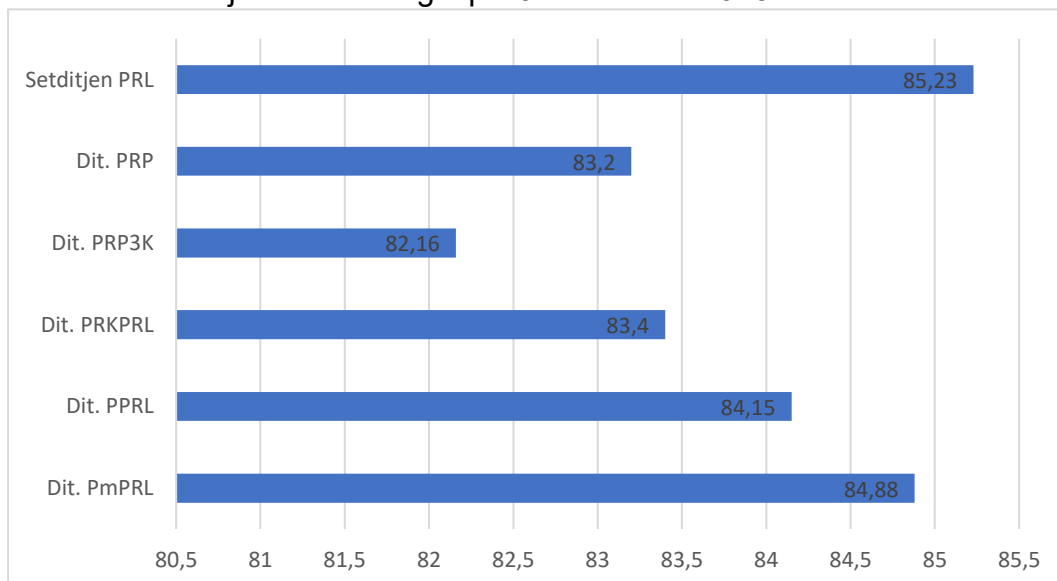
C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra DJPRL 2025-2029

Capaian indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%) Tahun 2025 dengan target tahunan adalah 100% dari target 80%. Target Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 untuk indikator kinerja ini pada tahun 2029 adalah 84%, sedangkan capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra, maka telah tercapai sebesar 114,29%.

D. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Nasional (Unit Organisasi Setara)

Perbandingan capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut:

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025



E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

1) Analisis

Capaian indikator kinerja “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan” pada mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Keberhasilan ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Direktorat PRP dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara sistematis dan berkelanjutan. Setiap temuan dari hasil evaluasi dan pengawasan internal dijadikan dasar untuk perbaikan proses bisnis, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut rekomendasi telah berjalan efektif melalui koordinasi antara unit kerja terkait, penerapan sistem pengendalian internal yang baik, serta adanya dorongan budaya kerja yang responsif terhadap masukan dan pembelajaran organisasi.

2) Kendala

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan masih menghadapi beberapa kendala. Beberapa rekomendasi memerlukan waktu lebih panjang untuk diimplementasikan karena terkait dengan kebijakan lintas unit dan keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran maupun ketersediaan SDM teknis. Selain itu, terdapat kendala administratif dalam proses koordinasi antarbagian, terutama dalam memastikan konsistensi dokumentasi bukti tindak lanjut dan kesesuaian format pelaporan. Dinamika perubahan kebijakan dan struktur organisasi juga menimbulkan kebutuhan penyesuaian terhadap mekanisme pelaksanaan rekomendasi agar tetap relevan dan terintegrasi dengan arah strategis organisasi.

3) Solusi

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator tersebut, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan secara berkala serta penetapan sistem pelaporan yang lebih terintegrasi dan terdigitalisasi agar proses verifikasi rekomendasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Direktorat PRP juga perlu memperkuat koordinasi lintas unit dan lintas bidang, terutama dalam pelaksanaan rekomendasi yang bersifat strategis, serta mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam analisis hasil pengawasan melalui pelatihan teknis dan pendampingan. Selain itu, diperlukan dukungan manajerial dalam bentuk alokasi sumber daya dan kebijakan internal yang memberikan ruang percepatan tindak lanjut, sehingga setiap hasil pengawasan tidak hanya dipenuhi secara administratif, tetapi juga menghasilkan perbaikan nyata terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PRP.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui peningkatan kinerja pengawasan melalui monitoring dan evaluasi (monev) berbasis aplikasi, seperti e-Monev Bappenas, Kinerjaku, dan Sistem Informasi Data Tindak Lanjut (SIDAK).

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

1. Rapat pembahasan penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK pada tanggal 28 Juli 2025
- Rapat ini membahas evaluasi dan klarifikasi terkait penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL). Dalam pertemuan tersebut, BPK memberikan masukan dan penekanan terhadap aspek akuntabilitas, kesesuaian penggunaan anggaran dengan peraturan perundangan, serta peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Ditjen PRL menyampaikan realisasi pemanfaatan PNBPN untuk mendukung program prioritas kelautan dan perikanan, serta berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK guna memastikan tata kelola keuangan yang efisien, tertib, dan sesuai prinsip good governance.



Gambar 11. Rapat pembahasan penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Monitoring indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dengan memanfaatkan layanan tindak lanjut online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui aplikasi SIDAK.

3.3.2 IKM 6 Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 5 “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” merupakan hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Penilaian ini mengukur sejauh mana penerapan manajemen kinerja telah dilaksanakan secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan kinerja yang berorientasi pada hasil. Nilai ini juga mencerminkan komitmen organisasi dalam menerapkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)” berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%).
2. Pengukuran kinerja (30%).
3. Pelaporan kinerja (15%).
4. Evaluasi kinerja (25%).

Formula Perhitungan

Teknik menghitung indikator ini adalah Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Laut merupakan nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Tim Sekretariat Ditjen Penataan Ruang Laut. Kategori nilai PM SAKIP sebagai berikut: yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan
BB	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Kurang
D	0 - 30	Sangat Kurang

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 10 Capaian IK Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai) Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan							
IK – 6	Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	66	72,25	109,47 (109,47)	-	66	109,47	80	90,31

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada tahun 2025 yaitu sebesar 72,25 predikat BB (Sangat Baik) sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Nomor B.1861/DJPRL.1/RC.610/XI/2025 tanggal 26 November 2025 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. adapun target indikator kinerja ini sesuai dengan perjanjian kinerja adalah sebesar 66, sehingga tercapai 109,47% (kinerjaku 109,47%). Rincian Hasil Penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel. Rincian Hasil Penilaian AKIP pada Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

No	Aspek Penilaian	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	23,40
3	Pelaporan Kinerja	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
Nilai		100	72,25
Predikat Penilaian			BB

Dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 telah tersedia dan dilaksanakan dengan baik, meskipun baru dapat dipertahankan selama satu tahun karena unit kerja ini baru terbentuk pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai dampak perubahan struktur organisasi KKP. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan memenuhi prinsip SMART, pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang serta dimanfaatkan dalam penyesuaian strategi, dan pelaporan kinerja telah memuat analisis pencapaian, keberhasilan atau kegagalan, serta perbaikan kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

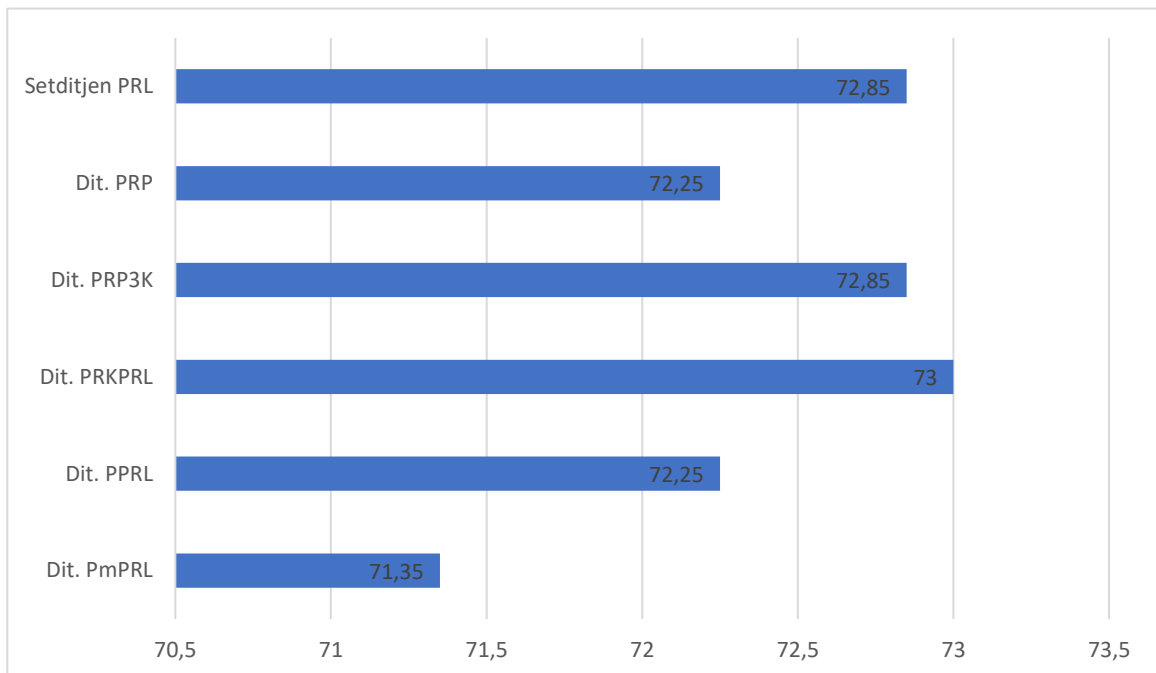
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

Target Renstra DJPRL tahun 2025 untuk IK ini adalah 66, sedangkan capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 72,25 sehingga capaian kinerjanya 109,47%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025–2029, capaian ini tidak hanya memenuhi target awal tahun 2025 tetapi juga hampir mencapai target akhir tahun 2029 yang ditetapkan yaitu sebesar 80. Sehingga bila dibandingkan telah tercapai 90,31% dari target akhir Renstra.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut:



Gambar Nilai PM SAKIP Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Nilai PM SAKIP Direktorat Perencanaan Ruang Perairan tahun 2025 lingkup DJPRL menempati posisi 4 dengan nilai 72,25 dengan predikat BB (sangat baik), bersama dengan Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala, dan Solusi

Pencapaian target indikator kinerja ini didorong oleh komitmen pimpinan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi dan dukungan Tim Pengelola Kinerja yang telah memiliki sertifikat e-learning SAKIP. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui aplikasi kinerjajaku merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian IK. Sementara itu, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan merupakan unit kerja yang baru dibentuk. Saat ini masih dalam proses melengkapi dokumen kinerja yang menjadi bahan penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Guna membantu capaian target atas IK ini salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan peran aktif pimpinan dan seluruh pegawai, antara lain melalui monitoring berkala oleh pimpinan untuk memastikan pencapaian indikator kinerja secara optimal.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian indikator ini dengan menggunakan sumber daya yang ada pada setiap tim kerja. Selain itu, implementasi SAKIP telah menggunakan sistem digital yaitu melalui *website* kinerjajaku.kkp.go.id.

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

- 1) PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL pada 16–18 September 2025
- Kegiatan ini Sebagai bagian dari indikator kinerja “Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (PRP)”, telah dilaksanakan Evaluasi dan Pendampingan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 16–18 September 2025 di Ruang Rapat Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan meliputi paparan penerapan SAKIP, coaching clinic aplikasi Kinerjaku, pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), serta evaluasi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan akuntabilitas internal. Tujuannya adalah menilai implementasi SAKIP di unit kerja pusat lingkup DJPRL sesuai Permen PAN-RB No. 88 Tahun 2021, sekaligus mengoptimalkan penggunaan aplikasi Kinerjaku sebagai instrumen evaluasi digital.
- Hasil evaluasi menunjukkan penerapan SAKIP DJPRL 2025 telah bertransformasi ke sistem digital melalui Kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) Beberapa catatan perbaikan dari hasil evaluasi KemenPAN-RB 2024 meliputi penyusunan target kinerja yang belum sepenuhnya berbasis realisasi, perlunya reviu pohon kinerja dan aspek crosscutting, serta peningkatan kualitas analisis dalam LKj. Penilaian mandiri Itjen 2025 juga menyoroti perlunya pemanfaatan hasil evaluasi internal untuk pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan secara daring melalui SIMWAS Itjen KKP (level I) dan Kinerjaku (level II–III), berpedoman pada UU No. 17/2007, Permen KP No. 35/2023, dan Permen KP No. 40/2022. Tantangan utama mencakup penyamaan persepsi hingga tingkat UPT, peningkatan peran pimpinan, dan konsistensi penerapan sistem penghargaan dan sanksi.



Gambar 12. PM SAKIP Tahun 2025 Level 2 Pusat Lingkup DJPRL pada 16–18 September 2025

H. Rencana Aksi Triwulan Selanjutnya

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Nilai PM SAKIP di lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, di antaranya:

1. Dialog kinerja 2026 lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan,

2. Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja tahun 2026 lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan.

3.3.3 IKM 7 Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 6 “Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)” mengukur jumlah dokumen laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam satu periode pelaporan. Laporan SPIP merupakan bentuk akuntabilitas manajerial atas pelaksanaan pengendalian intern dalam rangka mendukung tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menjaga aset negara, meningkatkan keandalan pelaporan, serta memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen) Tahun 2025

SK – 2		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan						
IK – 7		Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)						
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	2	2	100 (100)	-	2	100	3,9	53,97

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 2 dokumen dengan target tahunan 2 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%. Output dari capaian tersebut, yaitu:

1. Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang telah disampaikan melalui surat Nomor B.341/DJPRL.3/HP.420/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan II Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, dan
2. Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan yang telah disampaikan melalui surat Nomor B.638/DJPRL.3/HP.420/X/2025 tanggal 10 Oktober 2025 hal Penyampaian Laporan SPIP Periode Triwulan III Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2

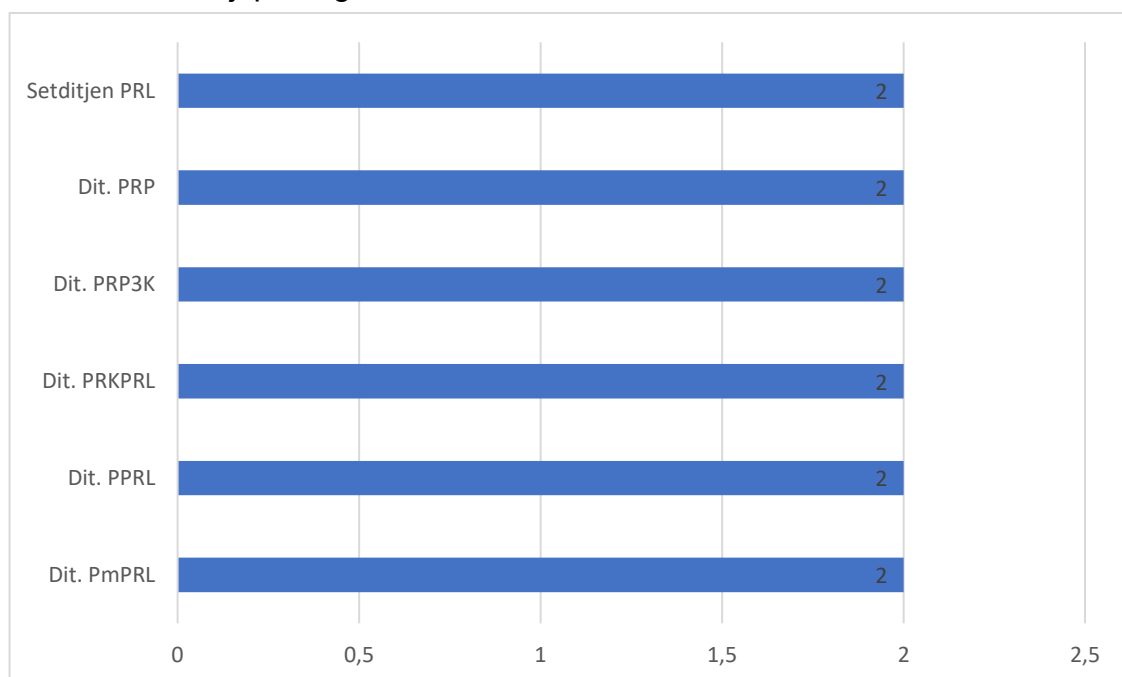
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Tahunan

Target Renstra DJPRL tahun 2025 untuk IK ini adalah 2 dokumen, sedangkan capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 2 dokumen sehingga capaian kinerjanya 100%. Target Renstra DJPRL Tahun 2025–2029 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 3,9 pada tahun 2029, capaian kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 2, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target renstra, maka telah tercapai sebesar 53,97%. Capaian tersebut belum memenuhi target Renstra DJPRL Tahun 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian IK Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut:



Gambar Laporan SPIP yang disusun Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 IK ini tercapai 100% untuk seluruh unit eselon II lingkup DJPRL.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

a. Analisis

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

b. Kendala

- Adanya pembentukan unit organisasi baru.

c. Solusi

- Meningkatkan peran serta dan keaktifan para pejabat dan pelaksana terkait dalam menginput informasi dan hal-hal terkait lainnya.

- Perlu dilakukan sosialisasi dengan pimpinan dalam penyusunan dokumen SPIP.

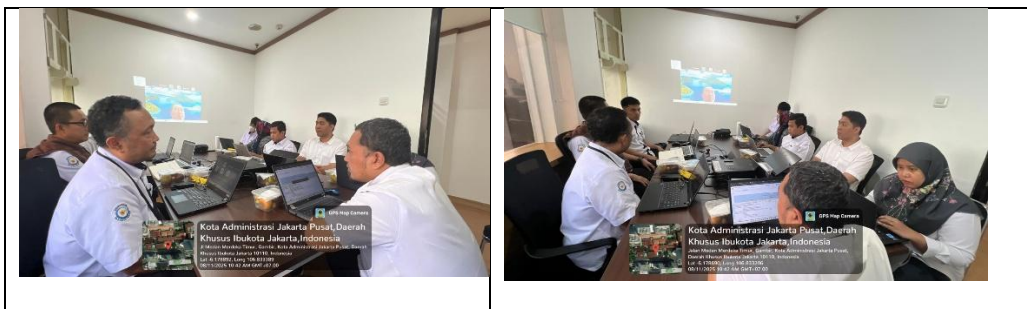
F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya telah dilaksanakan melalui keikutsertaan dan keaktifan para pegawai di Direktorat Perencanaan Ruang Perairan. Kegiatan monitoring dilakukan setiap minggu melalui apel pagi dengan pemberian teguran kepada pegawai oleh direktur.

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain :

1. Rapat Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 pada tanggal 11 Agustus 2025 di GMB II Lt.15
- Rapat Pembahasan Penggunaan PNBPN lingkup Ditjen PRL dengan BPK dipimpin oleh Sidiq Pranoto, dihadiri perwakilan Biro Keuangan dan BMN Setjen KKP, seluruh direktorat lingkup DJPRL, serta Dit. PRP. Rapat bertujuan menyeragamkan pemahaman pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Tahun 2025 guna meningkatkan efektivitas pengendalian intern DJPRL. Dibahas tata cara pengisian, indikator penilaian, serta penyepakatan mekanisme verifikasi oleh Sekretariat DJPRL dan Biro Keuangan. Setiap direktorat diminta segera menyelesaikan dan menyerahkan kertas kerja SPIP sesuai batas waktu yang ditetapkan.



Gambar 13 Rapat Koordinasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, yakni mengikuti kegiatan terkait pengendalian intern/manajemen risiko dan penyusunan laporan SPIP Triwulan IV.

3.3.4 IKM 8 Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)

Indikator Kinerja Manajerial (IKM) Nomor 7 “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” merupakan ukuran kuantitatif terhadap tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks ini disusun untuk menilai

sejauh mana ASN memiliki kapasitas dan integritas dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Formula Perhitungan

Teknik menghitung Indikator Kinerja Manajerial (IKM) “Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)” sebagai berikut :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Kategori:

Nilai 91 - 100 : Sangat Tinggi (sangat profesional)

Nilai 81 - 90 : Tinggi (cenderung profesional)

Nilai 71 - 80 : Sedang (rentan tidak profesional)

Nilai 61 - 70 : Rendah (cenderung tidak profesional)

Nilai <60 : Sangat Rendah (sangat tidak profesional)

Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memandang peningkatan profesionalitas ASN sebagai salah satu aspek strategis dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, berbagai langkah penguatan SDM telah dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, optimalisasi penilaian kinerja berbasis hasil, hingga penegakan disiplin kerja dan kode etik ASN.

Capaian IK pada Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks) Tahun 2025

SK – 2	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan							
IK – 8	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)							
Tahun 2024	Tahun 2025				Renstra 2025-2029			
Realisasi	Target PK	Capaian	% Capaian (%Kinerjaku)	Kenaikan 2024-2025 (%)	Target 2025	% Capaian 2025	Target 2029	% Capaian 2029
-	80	83,2	104 (104)	-	80	104	84	102,74

A. Capaian IK Tahun 2025

Capaian IK ini pada tahun 2025 adalah 83,2 dari target 80, sehingga persentase capaiannya adalah 102,74%. Capaian IP ASN Tahun 2025 Direktorat Perencanaan Ruang Perairan telah disampaikan melalui nota dinas Nomor 39/DJPRL.1/TU.210/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 hal Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2025 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2026.



IP ASN 2025

Dashboard

Eselon

Pegawai

FAQ

IP ASN 2024

Silakan ketik Nama Unit Kerj

Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	39	23.46	93.84 %	31.26	78.15 %	25.51	85.03 %	5	100 %	85.23	TINGGI
2	DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN	16	22.81	91.24 %	30.7	76.75 %	24.69	82.3 %	5	100 %	83.2	TINGGI
3	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	17	23.24	92.96 %	30.1	75.25 %	23.82	79.4 %	5	100 %	82.16	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN RUANG KOLOM PERAIRAN DAN DASAR LAUT	24	22.92	91.68 %	30.69	76.72 %	24.79	82.63 %	5	100 %	83.4	TINGGI
5	DIREKTORAT PEMBINAAN PENATAAN RUANG LAUT	13	23.85	95.4 %	30.31	75.77 %	25	83.33 %	5	100 %	84.15	TINGGI
6	DIREKTORAT PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT	14	21.79	87.16 %	32.73	81.82 %	25.36	84.53 %	5	100 %	84.88	TINGGI

Gambar Capaian IP ASN Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Tahun 2024

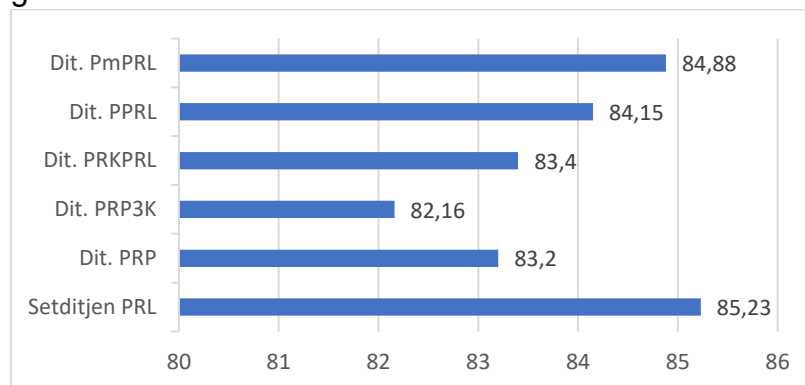
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya karena merupakan indikator baru di tahun 2025 serta adanya pembentukan unit organisasi baru berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra DJPRL 2025–2029

IK IP ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks) tidak terdapat pada Renstra sehingga capaian kinerja tahun 2025 tidak bisa dibandingkan dengan target Renstra DJPRL 2025-2029.

D. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional atau Unit Kerja Lain yang Setara di Kementerian

Perbandingan capaian IK IP ASN Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025 tersaji pada gambar berikut:



Gambar Capaian IP ASN Level II Lingkup DJPRL Tahun 2025

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2025 IK ini menempati posisi 2 terendah dari 6 unit eselon II lingkup DJPRL, dengan nilai 83,2. Hal ini disebabkan karena terdapat sertifikat dari beberapa orang pegawai yang tidak terverifikasi aplikasi MyASN.

E. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adanya keterbatasan untuk mendapatkan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN.

1) Analisis

Akses informasi terkait peluang peningkatan kompetensi/ profesionalisme ASN melalui website dan media sosial yang menawarkan pelatihan/seminar/workshop. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah memfasilitasi pengembangan kapasitas pegawai melalui E-Milea, yaitu platform pelatihan berbasis e-learning yang menawarkan model pelatihan mandiri, terbuka, tidak berbayar, dan menyediakan materi yang dapat diunduh secara langsung. Melalui model pembelajaran ini, peserta, termasuk ASN, dapat meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan dan minat masing-masing dengan format yang fleksibel dan dapat diakses kapan saja selama 24 jam, sehingga mendukung terwujudnya ASN yang profesional, adaptif, dan berdaya saing.

2) Kendala

Tidak terdapat kendala khusus dalam pelaksanaan indikator kinerja ini. Namun, proses klaim nilai JP pelatihan yang telah diikuti oleh para ASN dilakukan melalui aplikasi MyASN memerlukan beberapa tahapan, termasuk verifikasi oleh operator unit kerja masing-masing. Oleh karena itu, proses ini membutuhkan komitmen dan kedisiplinan ASN dalam menindaklanjuti proses administrasi secara mandiri agar data pelatihan dapat tervalidasi dengan tepat waktu dan akurat.

3) Solusi

Mengupayakan akses data dan informasi mengenai diklat, seminar, tugas belajar dan izin belajar, serta informasi lainnya yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas ASN. Selain itu, dilakukan monitoring capaian indikator secara online melalui <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>.

F. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dengan beberapa upaya, antara lain:

- 1) Peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar untuk ASN di masing-masing unit kerja.
- 2) Peningkatan kompetensi melalui beberapa pelatihan, seperti diklat teknis/jabatan fungsional, seminar, dan lain-lain. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keahlian (skill) dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Peningkatan kinerja melalui monitoring dan evaluasi (monev) capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

G. Kegiatan Pendukung

Adapun kegiatan pendukung yang telah dilakukan oleh Direktorat untuk mendukung capaian Indikator antara lain:

1. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut pada tanggal 20 Agustus 2025 secara hybrid di RR. Arwana Gedung Mina Bahari 2 Lantai 14 dan aplikasi Zoom Meeting meliputi 4 JP.



Gambar 14. Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi Lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut Tahun 2025

2. Pengelolaan Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 8 JP.
3. Microlearning Konflik Kepentingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 3 JP.

H. Rencana Aksi Tahun 2026

Rencana aksi tahun 2025 untuk indikator kinerja Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, antara lain keikutsertaan pegawai dalam

pelatihan/seminar/workshop atau kegiatan lain yang mendukung secara online dan pengisian capaian kinerja melalui aplikasi e-kinerja BKN.

3.4 Realisasi Anggaran

Merujuk pada dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan memiliki dua sumber pendanaan utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi serapan anggaran 65%. Beberapa akun belanja masih dalam status kondisi diblokir. Meski demikian, Direktorat Perencanaan Ruang Perairan tetap berupaya menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dengan dukungan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra. Beberapa kegiatan strategis tetap dapat dijalankan melalui koordinasi dan dukungan fasilitasi oleh pihak mitra, baik dalam bentuk asistensi maupun dukungan pelaksanaan kegiatan lapangan. Langkah ini menunjukkan komitmen Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dalam menjaga produktivitas dan memastikan keberlanjutan proses perencanaan serta pengelolaan ruang laut.

Setelah revisi PK 2025, jumlah pagu anggaran awal Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada tahun 2025 sebesar Rp.17.361.038.000,00 sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada tanggal 2 Desember 2025 dengan blokir anggaran sebesar Rp9.245.040.000,00 sehingga Pagu Efektif Tahun 2025 sebesar Rp.8.115.008.000,00 dengan nilai realisasi 95,7%.

Tabel. 9 Jumlah Pagu Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan dan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2025

KODE	KEGIATAN	PAGU (RP)	BLOKIR (RP)	PAGU EFEKTIF (RP)	REALISASI (RP)		SISA (RP)	SUMBER DANA	KETERANGAN
DIREKTORAT PRP		51.696.245.000,00	7.998.628.000,00	43.697.617.000,00	43.395.155.507,00	5,93	302.461.493,00		
2366.PBW.001	Rekomendasi kebijakan RZ KAW yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.372.154.000,00	1.008.120.000,00	1.364.034.000,00	1.349.004.216,00	99%	15.029.784,00	RM/PNBP	
2366.PBW.002	Rekomendasi Kebijakan Matek Perairan KSN yang akan diintegrasikan	3.494.500.000,00	1.833.849.000,00	1.660.651.000,00	1.577.491.286,00	95%	83.159.714,00	RM/PNBP	
2366.PBW.003	Rekomendasi Kebijakan Matek Perairan KSNT yang akan diintegrasikan	38.610.143.000,00	2.039.363.000,00	36.570.780.000,00	36.559.505.213,00	100%	11.274.787,00	RM/PNBP	
2366.PBW.007	Rekomendasi Integrasi RTRL dengan RTRWN	4.101.240.000,00	1.117.296.000,00	2.983.944.000,00	2.970.543.152,00	100%	13.400.848,00	RM/PNBP	
2366.PBW.008	Rekomendasi Kebijakan KSNT Non PPKT yang memiliki RZ KSNTNon PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	RM/PNBP	Kegiatan Sudah Tidak Dilaksanakan dan Anggaran di blokir
2366.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	995.500.000,00		995.500.000,00	816.205.250,00	0%	179.294.750,00	RM/PNBP	
2367.EBA.962.05	Operasional Perkantoran dan Tata	42.200.000,00		42.200.000,00	41.900.300,00	99%	299.700,00	RM/PNBP	
2367.EBA.994.05	Penyelenggaraan Operasional Dit.PRPP	80.508.000,00		80.508.000,00	80.506.090,00	100%	1.910,00	RM/PNBP	

Dalam laporan kinerja ini, realisasi anggaran dijadikan dasar dalam perhitungan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja terhadap penggunaan anggaran, adapun nilai kinerja organisasi Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada tahun 2025 ini adalah sebesar 107,07 dengan kategori baik dari perhitungan 8 indikator kinerja, sedangkan realiasi anggaran tahun 2025 adalah sebesar 95,7% dari total pagu anggaran, secara sederhana perhitungan tingkat efisiensi dan efektivitas dapat dihitung dengan formula nilai kinerja organisasi dibagi persentase realisasi anggaran dikali dengan 100%, sehingga didapat tingkat efisiensi sebesar 111,88% yang menunjukan efektivitas kinerja tinggi.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diperoleh dari penjelasan pada bagian atau bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Direktorat PRP memiliki 8 Indikator Kinerja yang terbagi dalam 2 sasaran kegiatan, yaitu 1) Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir dan 2) Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan, sebagaimana terlampir. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id), nilai capaian kinerja Direktorat PRP Tahun 2025 sebesar 107,07 (termasuk kriteria baik).
2. Pada Tahun 2025 terdapat 8 indikator yang telah tercapai sesuai target, yaitu:
 - 1) Integrasi RTRL dengan RTRWN
IKU Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan RTRWN telah tercapai 100%, dengan tersusunnya 1 Dokumen Materi Teknis RTRL yang terintegrasi ke dalam RTRWN sesuai target Tahun 2025.
 - 2) Penyusunan RZ Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)
IKU Perairan Laut Antar Wilayah yang memiliki Dokumen RZ KAW tercapai 100% dengan capaian 3 kawasan dari target 3 kawasan, meliputi RZ KAW Laut Utara Papua, Teluk Cendrawasih, dan Laut Barat Sumatera yang telah berada pada tahap harmonisasi dan proses penetapan.
 - 3) Penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)
IKU RZ KSN melampaui target dengan capaian 6 kawasan atau 150% dari target 4 kawasan, mencakup Selat Sunda, Aceh–Sumut Klaster Sabang, BBK, Maminasata, Teluk Bintuni, dan Taman Nasional Ujung Kulon yang berada pada berbagai tahapan harmonisasi, fasilitasi, dan legislasi.
 - 4) Penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)
IKU RZ KSNT tercapai 100% dengan tersusunnya Dokumen Final RZ KSNT Cadangan Karbon Biru Kalimantan Timur sesuai target 1 kawasan.
 - 5) Pemanfaatan Rekomendasi Hasil Pengawasan
IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat PRP mencapai 100%, melampaui target sebesar 80%.
 - 6) Nilai PM SAKIP
IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat PRP melampaui target, dengan capaian nilai 72,25 dari target 66 pada Tahun 2025.
 - 7) Penyusunan Laporan SPIP
IKM Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat PRP tercapai sesuai target, yaitu 2 dokumen dari target 2 dokumen pada Tahun 2025.

8) Indeks Profesionalitas ASN

IKM Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat PRP melampaui target, dengan capaian indeks 83,20 dari target 80 pada Tahun 2025.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan pada Tahun 2025, rekomendasi dalam rangka optimalisasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan yaitu:

1. Melaksanakan koordinasi dan pembahasan lintas sektor dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam rangka harmonisasi substansi dokumen RTRL, RZ KAW, RZ KSN, dan RZ KSNT;
2. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan substansi NSPK/pedoman teknis penataan ruang laut sebagai dasar pelaksanaan penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan ruang perairan.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan sebelumnya

-

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja **Awal** Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**
Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**
Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	6
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	3
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14.200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	234.025.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025		14.434.025.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp11.282.610.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebesar Rp.3.151.415.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Juni 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto

Perjanjian Kinerja **Perubahan** Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridirienprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdi Tunggal Priyanto**

Jabatan : Direktur Perencanaan Ruang Perairan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Kartika Listriana**

Jabatan : Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG PERAIRAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	1.	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang disusun (Dokumen)	1
		2.	Perairan Laut Antar Wilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW) (Kawasan)	3
		3.	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Kawasan)	4
		4.	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Kawasan)	1
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	5.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (%)	80
		6.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Nilai)	66
		7.	Laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Dokumen)	2
		8.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan (Indeks)	80

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.238.330.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Perencanaan Ruang Perairan	122.708.000
Total Anggaran Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025		17.361.038.000

Keterangan:

1. Blokir anggaran sebesar Rp9.245.940.000 sehingga Pagu Efektif Direktorat Perencanaan Ruang Perairan Tahun 2025 sebesar Rp.8.115.098.000;
2. Nomenklatur Kegiatan menyesuaikan dengan Organisasi baru.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal
Penataan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kartika Listriana

PIHAK PERTAMA
Direktur Perencanaan Ruang Perairan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Abdi Tunggal Priyanto